**PENDIDIKAN MASYARAKAT DI DAERAH 3T (TERTINGGAL, TERDEPAN DAN TERLUAR): KEBIJAKAN, KURIKULUM, KEPENDIDIKAN**

**Abstrak**

Pendidikan menjadi hal penting diperoleh masyarakat guna meningkatkan kualitas generasi bangsa indonesia yang baik terkhusus di daerah tertinggal, terdepan dan terluar. Pendidikan dalam prosesnya memerlukan kurikulum guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pemerintah telah memperhatikan terkait pendidikan masyarakat di daerah tersebut dengan mengeluarkan program SM3T dan masyarakat tersebut harus memiliki pemerataan akses kependidikan dan kesesuaian kurikulum. Jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif, adapun metode yang digunakan ialah kajian pustaka elektronik (*e-library research*) dengan pendekatan sosiologis. Teknik penyajian data dengan dokumentasi. Teknik analisis data serta penarikan kesimpulan dengan tiga langkah, yaitu: *editing, organizing* dan inferensi. Hasil penelitian ini akan membahas terkait kebijakan, kurikulum dan kependidikan berupa kesetaraan pada proses pembelajaran di masyarakat 3T (tertinggal, terdepan dan terluar).

**Kata Kunci:** Pendidikan, Masyarakat 3T, Kebijakan, Kurikulum.

**Pendahuluan**

Pendidikan sangat menjadi perkara yang sangat penting untuk diperoleh pada setiap individual para generasi penerus bangsa, terkhusus bangsa Indonesia. Para generasi penerus bangsa jika memperoleh pendidikan secara baik maka akan terciptanya dan meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia, sehingga pendidikan dapat diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara (Depdiknas, 2003). Maka dari itu, pendidikan suatu kewajiban yang harus diperoleh bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Adapun pendidikan di Indonesia yang wajib diperoleh ialah selama sembilan tahun atau jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama (SD-SMP) guna meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa di kemudian hari.

Pendidikan yang ada di Indonesia ini hendaknya dapat meluas dan merata di segala daerah yang ada, baik dari Sabang hingga Merauke, terkhusus pada daerah tertinggal, terdepan dan terluar yang berada di Indonesia. Menurut data terakhir pada tanggal 1 Juli 2020, Negara Indonesia memiliki kurang lebih sebanyak 17.499 pulau dengan luas total wilayah sekitar 7.810.000.000 Km2. Adapun rincian total luas wilayah tersebut terbagi menjadi dua bagian: luas lautan dan luas daratan dengan rincian sebagai berikut; luas lautan di Indonesia sekitar 3.250.000.000 Km2 dan luas daratan sekitar 2.550.000.000 Km2 (Pratama, 2020). Jumlah pulau yang ada tersebut pendidikan diharuskan agar dapat diperoleh oleh masyarakat Indonesia, terkusus pada daerah tertinggal, terdepan dan terluar atau dikenal dengan daerah 3T.

Daerah 3T tersebut sangat diutamakan dan diperhatikan dalam kebutuhan pendidikan bagi masyarakat yang berada di daerah tersebut. Pendidikan yang diberikan pada daerah-daerah yang ada di Indonesia harus memiliki suatu panduan atau kurikulum tertentu, hal ini disebabkan karena tidak bisa disamakan dengan daerah yang di luar daerah 3T tersebut dan kurikulum yang dirancang harus menyesuaikan kebutuhan masyarakat.

Permasalahan terkait Pendidikan di daerah 3T yang bisa dilihat ialah kurangnya distibusi tenaga pendidik atau guru di daerah 3T. Kurangnya tenaga pendidik disebabkan karena jumlah tenaga pendidik masih sedikit dan keberadaan tenaga pendidik tersebut yang belum merata di daerah 3T, sehingga membuat pemerintah menyadari kebutuhan pendidikan di masyarakat daerah tersebut. Bentuk perhatian pemerintah Indonesia dalam hal menanggani permasalahan pendidikan di daerah 3T dengan menyelenggarakan suatu program yaitu Program Sarjana Mendidik di Daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar atau dikenal dengan program (SM3T) guna mencetak para tenaga pendidik yang profesional dan siap ditempatkan dan mengabdi pada daerah-daearah tertinggal, terdepan atau terluar di Indonesia.

Program SM3T ini merupakan salah satu kebijakan yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia ini dilaksanakan pada tingkat perguruan tinggi baik perguruan tinggi swasta ataupun perguruan tinggi negeri, yang mana tidak semua perguruan tinggi yang ada di Indonesia akan tetapi hanya pada 17 perguruan tinggi negeri, diantaranya: Universitas Pendidikan Indonesia (UPI Bandung), Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Negeri Semarang (UNNES), Universitas Negeri Padang (UNP), Universitas Negeri Medan (UNIMED), Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Universitas Negeri Malang (UM), Unversitas Pendidikan Ganesha (UNDIKSHA), Universitas Negeri Makassar (UNM), Universitas Negeri Manado (UNIMA), Unversitas Negeri Gorontalo (UNG), FKIP Universitas Syiah Kuala (UNSYIAH), FKIP Universitas Mulawarman (UNMUL) dan FKIP Universitas Tanjungpura (UNTAN). Program SM3T tersebut semoga kebutuhan pendidikan masyarakat di daerah 3T dapat baik dan merata, baik segi kurikulum, kebijakan dan kependidikan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis akan lebih membahas pendidikan yang ada di daerah 3T dengan 3 sektor, yaitu: kurikulum, kebijakan dan kependidikan. Penulis berharap dengan yang ditulis pada artikel ini dapat menjadi referensi dan sumber data untuk penelitian selanjutnya terkhusus pada kajian daerah 3T di Indonesia.

**Metode**

Jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif, adapun metode yang digunakan ialah kajian pustaka elektronik (*e-library research*) dengan pendekatan sosiologis. Penulis memilih jenis, metode dan pendekatan tersebut dikarenakan penelitian ini bersifat kajian pustaka yang mana penulis lakukan kajian pustaka secara online dan sesuai dengan keadaan sosial yang terjadi menurut pengamatan penulis. Teknik penyajian data dengan dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan data-data berupa file dan dokumentasi yang didapatkan secara online. Adapun teknik analisis data serta penarikan kesimpulan dengan tiga langkah, yaitu: *editing, organizing* dan inferensi (Mathew B. Miles, 1984).

**Hasil dan Pembahasan**

Artikel ini akan membahas terkait pendidikan masyarakat di daerah 3T secara teoritis, yang mana terbagi memjadi tiga pembahasan, yaitu: 1) Kurikulum, 2) Kebijakan dan 3) Kependidikan.

***Daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar***

1. Definisi Daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar

Daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar atau yang dikenal dengan daerah 3T ini merupakan sejumlah daerah yang ada di Indonesia. Ketiga daerah tersebut dapat dikategorikan sebagai daerah yang khusus karena daerah tertinggal, terdepan atau terluar ini memiliki syarat khusus tersendiri, diantaranya: Suatu daerah ditetapkan sebagai berdasarkan kriteria: a) perekonomian masyarakat, b) sumber daya manusia, c) sarana dan prasarana, d) kemampuan keuangan daerah, e) aksesibilitas, f) karakteristik daerah (HAM, 2015).

Oleh karena itu, daerah 3T hanya terdapat di beberapa wilayah di Indonesia. Hal ini dikarenakan harusnya terpenuhi antara keenam syarat tersebut, jika tidak ada salah satu keenam syarat tersebut maka belum bisa dikatakan daerah tertinggal, terdepan ataupun terluar di wilayah Indonesia.

1. Wilayah Daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar

Berikut rincian pembagian wilayah untuk daerah 3T: (Firman, 2020)

**Tabel 1. Wilayah Daerah 3T**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Provinsi | Kabupaten Daerah |
| 1 | Sumatera Utara | Nias |
| 2 | Nias Selatan |
| 3 | Nias Utara |
| 4 | Nias Barat |
| 5 | Sumatera Barat | Kepulauan Mentawai |
| 6 | Sumatera Selatan | Musi Rawas Utara |
| 7 | Lampung | Pesisir Barat |
| 8 | Nusa Tenggara Barat | Lombok Utara |
| 9 | Nusa Tenggara Timur | Sumba Barat |
| 10 | Sumba Timur |
| 11 | Kupang |
| 12 | Timor Tengah Selatan |
| 13 | Belu |
| 14 | Alor |
| 15 | Lembata |
| 16 | Manggarai Timur |
| 17 | Rote Ndao |
| 18 | Sumba Tengah |
| 19 | Sumba Barat Daya |
| 20 | Sabu Raijua |
| 21 | Malaka |
| 22 | Sulawesi Tengah | Donggala |
| 23 |  | Tojo Una-Una |
| 24 |  | Sigi |
| 25 | Maluku | Maluku Tenggara Barat |
| 26 | Kepulauan Aru |
| 27 | Seram Bagian Barat |
| 28 | Seram Bagian Timur |
| 29 | Maluku Barat Daya |
| 30 | Buru Selatan |
| 31 | Maluku Utara | Kepulauan Sula |
| 32 | Pulau Taliabu |
| 33 | Papua Barat | Teluk Wondama |
| 34 | Teluk Bintuni |
| 35 | Sorong Selatan |
| 36 | Sorong |
| 37 | Manokwari Selatan |
| 38 | Tambrauw |
| 39 | Pegunungan Arfak |
| 40 | Maybrat |
| 41 | Papua | Jayawijaya |
| 42 | Nabire |
| 43 | Paniai |
| 44 | Puncak Jaya |
| 45 | Boven Digoel |
| 46 | Mappi |
| 47 | Asmat |
| 48 | Yahukimo |
| 49 | Pegunungan Bintang |
| 50 | Tolikara |
| 51 | Keerom |
| 52 | Waropen |
| 53 | Supiori |
| 54 | Mamberamo Raya |
| 55 | Nduga |
| 56 | Lanny Jaya |
| 57 | Mamberamo Tengah |
| 58 | Yalimo |
| 59 | Puncak |
| 60 | Dogiyai |
| 61 | Intan Jaya |
| 62 | Deiyai |

***Kurikulum***

1. Definisi Kurikulum

Kurikulum merupakan sebuah perangkat perencanaan dan peraturan yang memuat isi, tujuan serta metode dan strategi yang tersusun dan disesuaikan dengan kebutuhan tujuan pembelajaran. (Hamdi, 2017) Istilah kurikulum pertama kali muncul di Skotlandia pada tahun 1892 dan baru resmi digunakan di Amerika Serikat satu abad setelahnya. Kurikulum berasal dari bahasa Yunani *curir* yang berarti pelari dan *curere* yang bermakna tempat berpacu atau tempat berlomba, sehingga definisi kurikulum bisa diartikan dengan jarak tempuh yang dibutuhkan seorang pelari dalam sebuah arena lomba. (Wahyuni, 2015) Adapun secara terminologi, kurikulum dalam dunia pendidikan diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang haru ditempuh dan dituntaskan siswa untuk memperolah ijazah atau suatu tingkatan pendidikan.

Kurikulum juga diartikan sebagai suatu rancangan tertulis yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembelajaran. (Ansyar, 2017) Eisner dalam Zaunuri menjelaskan tentang fungsi kurikulum sebagai pedoman dan acuan bagi para pendidik dalam pelakasanaan kegiatan pembelajaran. Kurikulum juga berperan sebagai pedoman dalam pengawasan belajar siswa di rumah. Bagi siswa kurikulum berfungsi sebagai acuan dalam belajar, sedangkan bagi masyarakat peran kurikulum adalah sebagai pedoman yang akan membantu terwujudnya kegiatan belajar-mengajar di sekolah. (Zainuri, 2018) Setiap kurikulum dipersiapkan agar peserta didik aktif dalam mengikuti proses pembelajaran dan juga turut berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga bisa disimpulkan mengenai kurikulum dalam tiga konteks, yaitu sebagai sebuah rancangan yang dibuat untuk menjadi acuan dan pedoman dalam proses pembelajaran di sekolah, kurikulum sebagai pengalaman belajar dan kurikulum sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus dituntaskan oleh siswa. Sebagai pengalaman belajar kurikulum diartikan sebagai semua kegiatan belajar siswa yang dilakukan di bawah pengawasan guru baik di dalam maupun di luar sekolah. (Mudlofir, 2012).

Di Indonesia tercatat telah ada 10 kurikulum yang pernah digunakan dimulai dari tahun pertama pada 1947, 1952, 1964, 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984, kurikulum edisi revisi 1999, kurikulum 2004, KTSP 2006 dan terakhir adalah kurikulum 2013 atau yang dikenal dengan istilah K13. (Matdoan, 2020) Kurikulum memuat empat aspek penting berupa tujuan, materi/isi, organisasi, dan evaluasi. (Baderiah, 2018) *Pertama,* komponen tujuan yaitu aspek yang sangat fundamental karena akan memberikan arah pada semua aspek program pendidikan. Tujuan pendidikan terdiri dari empat tingkatan, yaitu: tujuan pendidikan nasional, tujuan pendidikan institusional, tujuan pendidikan kurikulum dan tujuan instruksional. *Kedua,* komponen materi. Materi merupakan semua pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan sikap yang terorganisasi dalam mata pelajaran. Agar setiap tujuan pembelajaran yang direncanakan dapat tercapai, maka diperlukan bahan ajar yang relevan dengan tujuan kurikulum. *Ketiga,* komponen organisasi. Adanya perbedaan antara belajar di rumah dan di sekolah, maka diperlukan sebuah pengorganisasian secara formal di sekolah. Organisasi kurikulum adalah tataran materi, baik yang berkenaan dengan bentuk bahan dan pelaksanaannya. *Keempat,* komponen evaluasi, yaitu aspek yang sangat penting untuk mengetahui sejauh mana ketercapaian tujuan yang telah direncanakan.

1. Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan di Daerah 3T

Pelaksanaan kurikulum dibagi kepada dua kategori, yaitu pelaksanaan kurikulum tingkat sekolah dan tingkat kelas. Kurikulum tingkat sekolah, dalam hal ini langsung ditangani oleh kepala sekolah. Selain bertugas mendesain kurikulum agar terlaksana di sekolah, kepala sekolah juga berperan sebagai penanggung jawab dalam menyusun kegiatan sekolah, seperti membuat kalender akademik untuk satu tahun atau dua semester, menyusun jadwal mata pelajaran mingguan, mengatur tugas dan kewajiban guru serta hal-hal lainnya berkenaan dengan tujuan kurikulum yang telah direncanakan. Adapun kurikulum tingkat kelas, dalam hal ini langsung ditugaskan dan dibagikan kepada guru. Pembagian tugas ini di antaranya meliputi dalam proses belajar mengajar, pembinaan ekstrakulikuler penunjang yang berada diluar cakupan kurikulum, dan membimbing kegiatan pembelajaran dalam rangka memajukan potensi yang ada di dalam diri siswa serta membantu siswa dalam memecahkan permasalahannya. (Huda, 2017) Adapun pelaksanaan kurikulum di daerah 3T sangat memerlukan keterlibatan dari berbagai pihak. Di antara langkah yang bisa dilakukan agar tujuan kurikulum di daerah 3T bisa tercapai adalah dengan menerapkan model sekolah kebangsaan.

Model sekolah kebangsaan merupakan salah satu cara yang bisa dilakukan guna menuju kesejahteraan sebuah Negara, karena dengan sekolah kebangsaan bisa menjadi wadah untuk menumbuh kembangkan wawasan kebangsaan mengenai kebenaran pancasila sebagai ideologi negara dan dasar Negara serta pandangan hidup bangsa, menanamkan rasa cinta tanah air serta rasa rela berkorban untuk bangsa dan Negara dalam menuju bangsa yang sejahtera. Sekolah kebangsaan merupakan proses pembelajaran yang memuat tentang semangat kebangsaan yang terdapat dalam cita-cita nasional bangsa Indonesia, mengembangkan eksistensi Indonesia atau nilai-nilai nasional bangsa Indonesia, pengembangan kompetensi dan budaya bangsa berbhineka tunggal ika yang berkarakter yang perlu dimiliki oleh masyarakat di daerah 3T. (Asriati, 2017).

Pembelajaran pendidikan sekolah kebangsaan memuat tentang model pembelajaran *living history*, pendidikan nilai perjuangan, *life skill*, pendidikan karakter, kewirausahaan, bela negara serta *soft skill*. Cara yang bisa dilakukan untuk menerpan pembelajaran *living history* adalah dengan mengaitkan antara materi pelajaran dengan contoh kehidupan secara nyata yang terjadi di daerah 3T tersebut agar siswa mendapat gambaran yang lebih hidup dengan pembelajaran yang sesuai dengan konteks siswa, membuat kunjungan langsung ke sumber sejarah dan melakukan studi kasus berkenaan dengan aspek di lingkungan sekitar peserta didik tinggal. Model pembelajaran ini, bisa mengubah pola kurikulum yang ada di daerah 3T. Model pembelajaran ini menonjolkan aspek kebudayaan lokal sehingga bisa dijadikan sebagai sebuah proses pembelajaran yang layak dalam upaya meningkatkan mutu sekolah di daerah 3T.

***Kebijakan***

1. Definisi Kebijakan

Kebijakan diartikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap untuk bertindak maupun tidak, yang dilakukan oleh para pihak, sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. (Abdullah Ramadhani, 2017)

Kebijakan memiliki dua aspek (Thoha, 2012), yakni: a) kebijakan merupakan praktika sosial, kebijakan bukan *event* yang tunggal. Oleh karena itu, kebijakan merupakan sesuatu yang dihasilkan pemerintah yang dirumuskan berdasarkan dari segala kejadian yang terjadi di masyarakat. Kejadian tersebut ini tumbuh dalam praktika kehidupan kemasyarakatan dan bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, terisolasi, dan asing bagi masyarakat. b) kebijakan merupakan suatu respon atas peristiwa yang terjadi, baik untuk menciptakan harmoni dari pihak-pihak yang bermasalah, maupun menciptakan intensif atas tindakan bersama bagi para pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas usaha bersama tersebut.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap permasalahan sesuatu dirasa sangat penting, hal ini dikarenakan bahwa segala kegiatan hendaknya berlandasan kepada kebijakan pemerintah, salah satunya kebijakan pendidikan masyarakat untuk daerah 3T tersebut, yang mana pemerintah telah dikeluarkan dan ditetapkan dengan program SM3T. Kebijakan pendidikan tersebut bertujuan agar masyarakat di daerah 3T dapat menikmati pendidikan yang layak guna terciptanya generasi penerus bangsa yang baik dan profesional.

1. Kebijakan Terhadap Pendidikan di Daerah 3T

Kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau dikenal dengan Kemendikbud RI dalam rangka pemerataan pendidikan masyarakat di daerah 3T dengan beberapa program pendidikan, diantaranya ialah Program Sarjana Mendidik di Daerah 3T (SM3T), Program Guru Garis Depan (GGD) dan Guru yang bertugas di daerah khusus, Program Sertifikasi Keahlian dan Sertifikasi Pendidik bagi Guru SMA/SMK (Program Keahlian Ganda), Program Pemberian Subsidi Bantuan Pendidikan Konversi GTK PAUD dan DIKMAS, Program Diklat Berjenjang bagi Pendidik PAUD. (Kemendikbud, 2017)

Berbagai macam kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia melalui Kemendikbud RI tersebut, pada artikel ini akan membahas satu program yaitu: Program Sarjana Mendidik di Daerah 3T (SM3T).

Program SM3T ini merupakan salah satu program pemerintah dibawah kendali Kemendikbud RI, program ini serupa dengan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di perguruan tinggi. Adapun perbedaannya program SM3T ini dibawah kendali Kemendikbud RI, adapun program KKN dibawah kendali Universitas atau Institut atau Sekolah Tinggi atau Akademik tertentu. Selain itu juga program SM3T ini tidak mengeluarkan biaya karena program SM3T biaya ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah, adapun program KKN ini mengeluarkan biaya yang lumayan karena biaya ditanggung oleh peserta dan instansi tertentu.

Program SM3T ini memiliki keuntungan tersendiri diantaranya; a) Program resmi dari pemerintah Indonesia, b) Mendapatkan beberapa fasilitas, yaitu: *fee* (biaya) dan sertifikat, c) Dapat melanjutkan pada program-program pemerintah, diantaranya Profesi Pengembangan Guru (PPG), Program Guru Garis Depan (GGD) dan Program SILN (Sekolah Indonesia Luar Negeri), d. Lebih memahami adat istiadat di tempat kegiatan program SM3T yang telah ditentukan.

Program SM3T ini memiliki tujuan sebagai berikut: 1) Membantu daerah 3T dalam mengatasi permasalahan pendidikan terutama kekurangan tenaga pendidik, 2) Memberikan pengalaman pengabdian kepada Sarjana Pendidikan sehingga terbentuk sikap profesional dan terampil dalam memecahkan masalah pendidikan, 3) Menumbuhkan sikap cinta tanah air, bela negara, peduli, empati, terampil memecahkan masalah kependidikan, dan bertanggung jawab terhadap kemajuan bangsa; 4) Membangun daya juang dan ketahanmalangan dalam mengembangkan pendidikan di daerah-daerah yang tergolong 3T, 5) Meningkatkan kecintaan terhadap profesi sebagai guru yang bertugas di daerah 3T, 6) Mempersiapkan calon pendidik profesional sebelum mengikuti program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Adapun peserta program SM3T ini memiliki tugas sebagai berikut: 1) Melaksanakan tugas pembelajaran pada satuan pendidikan sesuai dengan bidang keahlian dan tuntutan kondisi setempat, 2) Mendorong kegiatan inovasi pembelajaran di sekolah, 3) Melakukan kegiatan ekstrakurikuler, 4) Membantu tugas-tugas yang terkait dengan manajemen pendidikan di sekolah, 5) Melakukan tugas sosial dan pemberdayaan masyarakat untuk mendukung program pembangunan pendidikan dan kebudayaan di daerah 3T.

***Kependidikan***

1. Definisi Kependidikan

Kependidikan berasal dari kata pendidikan yang berimbuhan *ke-an* sehingga memiliki arti segala sesuatu yang dapat berhubungan dengan pendidikan, baik tenaga pendidik, guru, akses pendidikan dan elemen-elemen pendidikan lainnya. Adapun pembahasan poin kependidikan pada artikel ini hanya seputar akses pendidikan.

1. Akses pendidikan Terhadap Pendidikan di Daerah 3T

Akses pendidikan merupakan salah satu penunjang suksesnya berjalannya program SM3T di daerah 3T. Akses pendidikan masih belum merata dan meluas hingga saat ini, hal ini dibuktikan masih ada 62 daerah yang tergolongkan sebagai daerah 3T. Oleh karena itu, akses pendidikan harus bisa merata dan meluas diberikan pada daerah 3T tersebut, beberapa upaya agar akses pendidikan dapat merata dan meluas sebagai berikut: (Hutagaol, 2017)

**Pertama**, peningkatan pendapatan masyarakat. Penyebab tidak meratanya pendidikan di antaranya ketidakmampuan orang tua menyekolahkan anaknya. Pola pikir masyarakat daerah 3T di Indonesia sebagian besar masih lebih kepada cara bertahan hidup, sehingga pendidikan di daerah tersebut mengalami kendala. Karenanya pemerintah perlu terlebih dahulu meningkatkan pendapatan masyarakat. Jika pendapatan masyarakat Indonesia meningkat tentu mereka akan memilih bersekolah. **Kedua**, menciptakan pendidikan yang sesuai karakteristik masyarakat Indonesia. Pemerintah tidak semestinya membuat kebijakan yang sama untuk pendidikan di kota dan di desa. Hal ini bisa dilakukan dengan menempatkan guru yang bersedia mengabdi untuk pendidikan anak-anak di daerah-daerah dan tentu saja untuk ini pemerintah harus memperhatikan kesejahteraan mereka. **Ketiga**, peningkatan bahan bacaan. Buku merupakan media pembelajaran terpenting dalam proses belajar-mengajar. Karenanya diperlukan ketersediaan perpustakaan di seluruh wilayah Indonesia, terkhusus pada daerah-daerah 3T. Ketersediaan buku akan membantu guru dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada siswa. Selain itu, adanya perpustakaan akan memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk mengisi waktu luangnya dengan membaca buku.

**Kesimpulan**

Pendidikan masyarakat di daerah 3T sangat membutuhkan perhatian khusus baik dari pemerintah dan masyarakat setempat. Pendidikan di daerah 3T tersebut juga memperhatikan tiga sektor, yaitu: kurikulum, kebijakan dan kependidikan, sehingga diharapkan dapat lebih memperhatikan kembali terhadap kebutuhan pendidikan di daerah 3T, agar terciptanya generasi penerus bangsa yang baik dan profesional dikemudian hari. Semoga artikel ini dapat memberikan penjelasan bagi penelitian selanjutnya terhadap pendidikan ataupun daerah tertinggal, terdepan dan terluar.

# Daftar Pustaka

Abdullah Ramadhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik, Vol. 11 No. 01*, 1-12.

Ansyar, M. (2017). *Kurikulum Hakikat, Fondasi, Desain dan Pengembangan.* Jakarta: Kencana.

Asriati, N. (2017). Pembangunan Model Pendidikan Menengah "Sekolah Kebangsaan" di Daerah 3T dan Sempadaan Kalimantan Barat Sarawak Malaysia. *International Research Journal of Education and Sciences (IRJES), Vol. 1 Special Issue 1 (Malay)*, 43-50.

Baderiah. (2018). *Buku Ajar Pengembangan Kurikulum.* Palopo: Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo.

Depdiknas. (2003). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20. Jakarta.

Firman. (2020, Mei 11). *Ini Daerah Tertinggal Menurut Perpres*. Retrieved April 13, 2021, from www.kemendesa.go.id: https://www.kemendesa.go.id/berita/view/detil/3261/ini-daerah-tertinggal-menurut-perpres.

HAM, M. H. (2015, Januari 21). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015. *Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi*.

Hamdi, M. M. (2017, Oktober). Konsep Pengembangan Kurikulum. *INTIZAM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Volume 1, Nomor 1*, 1-13.

Huda, N. (2017). Manajemen Pengembangan Kurikulum. *Jurnal Manajemen Pengembangan Kurikulum*, 52-75.

Hutagaol, N. M. (2017, Juni 5). *Akses Pendidikan, Masalah dan Solusi*. Retrieved April 13, 2021, from www.medanbisnisdaily.com: https://medanbisnisdaily.com/news/read/2017/06/05/302633/akses-pendidikan-masalah-dan-solusi/.

Kemendikbud. (2017, November 25). *Kemendikbud Siapkan Lima Program Afirmasi untuk Pemenuhan Guru di Daerah*. Retrieved April 13, 2021, from www.kemdikbud.go.id: https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/11/kemendikbud-siapkan-lima-program-afirmasi-untuk-pemenuhan-guru-di-daerah#:~:text=Program%20SM3T%20adalah%20program%20pengabdian,daerah%203T%20selama%20satu%20tahun.

Matdoan, M. N. (2020, September). Efektifitas Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013 pada Satuan Pendidikan di Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah. *Public Policy Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis, Vol. 1 No. 2*, 153-177.

Mathew B. Miles, M. H. (1984). *The Qualitative Research's Companion.* California: Sage Publications.

Mudlofir, A. (2012). *Aplikasi Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan Bahan Ajar Dalam Pendidikan Agama Islam.* Jakarta: Raja Grafindo.

Pratama, O. (2020, Juli 01). *Konservasi Perairan Sebagai Upaya menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia*. Retrieved April 13, 2021, from Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut: https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia

Thoha, M. (2012). *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Wahyuni, F. (2015, Juli). Kurikulum dari Masa Ke Masa (Telaah Atas Pentahapan Kurikulum Pendidikan di Indonesia). *Al-Adabiya, Vol. 10 No. 2*.

Zainuri, A. (2018). *Konsep Dasar Kurikulum Pendidikan.* Palembang: Noer Fikri.